Available online at http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/PROSNMEB
Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi Bisnis
Volume 1, Mei 2017

Penerapan Flexible ITF (Inflation Targeting Framework): Sinergitas Kebijakan Moneter Indonesia dengan Sasaran Kestabilan Harga

Tommy Pusriadi[1], Dio Caisar Darma[2]
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda, Indonesia
E-mail: kahalaindonesia@gmail.com

Abstrak

Setelah krisis moneter tahun 1997, nilai tukar rupiah mulai stabil dan menguat dari rata-rata Rp 9.316 per dolar AS pada tahun 2002 menjadi rata-rata Rp 8.572 per dolar AS pada tahun 2003. Demikian pula, laju inflasi menurun dari 10,03% pada tahun 2002 menjadi 5,06% pada tahun 2003. Dengan perkembangan yang menggembirakan ini, Bank Indonesia mulai dapat menurunkan suku bunga SBI secara bertahap untuk lebih mendorong sektor rill dan pemulihan ekonomi nasional. Suku bunga SBI menurun dari 13,02% pada akhir tahun 2002 menjadi 7,34% pada Juni 2004. Melalui amandemen UU Nomor 23 Tahun 1999 dalam UU Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia diberikan kewenangan penuh dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneternya. Berdasarkan pada kerangka kerja yang dikenal dengan sebutan Flexible Inflation Targeting Framework (ITF) yang pertama kali diterapkan oleh Selandia Baru pada tahun 1990, lebih diarahkan kepada upaya menciptakan dan menjaga stabilitas moneter. Secara ringkas, pokok-pokok konsep dasar penerapan ITF dimaksud dapat disarikan sebagai berikut : (1) Sasaran Inflasi, (2) Kebijakan Moneter mengarah kedepan, (3) Transparasi dan (4) Akuntabilitas. Dengan penerapan kerangka kebijakan moneter berdasar ITF secara penuh dengan suku bunga sebagai sasaran-operasional yang telah dicanangkan Bank Indonesia mulai tahun 2004 ini diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: ITF, Kebijakan Moneter dan Kestabilan Harga

Flexible ITF (Inflation Targeting Framework) Implementation: The Synergy of Indonesia's Monetary Policy with Stable Price Objectives

Abstract

After the monetary crisis of 1997, the rupiah exchange rate stabilized and strengthened from an average of Rp 9,316 per US dollar in 2002 to an average of Rp 8,572 per US dollar in 2003. Similarly, the inflation rate decreased from 10,03% in 2002 to 5,06% in 2003. With this encouraging development, Bank Indonesia began to reduce the SBI rate gradually to further boost the real sector and national economic recovery. The SBI rate decreased from 13,02% at the end of 2002 to 7,34% in June 2004. Through amendment of Law Number 23 Year 1999 in Law Number 3 Year 2004, Bank Indonesia is given full authority in formulating and implementing its monetary policy. Based on a framework known as the Flexible Inflation Targeting Framework (ITF), which was first implemented by New Zealand in 1990, is more directed at creating and maintaining monetary stability. In summary, the basic concepts of the application of the ITF can be summarized as follows : (1) Inflation Target, (2) Monetary Policy Ahead, (3) Transparency and (4) Accountability. With the implementation of a full-based ITF monetary policy framework with interest rates as an operational target set by Bank Indonesia beginning in 2004 is expected to work well.

Keywords: ITF, Monetary Policy and Price Stability

Copyright © 2017, Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi Bisnis ISSN: 2579-8715

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah menimbulkan berbagai permasalahan yang demikian sulit dan kompleks di berbagai bidang. Krisis yang mulanya berasal dari krisis moneter telah berubah cepat menjadi krisis ekonomi, krisis sosial budaya, krisis politik dan menjadi "krisis multidimensi". Pemicu utama krisis moneter tersebut adalah seragam spekulasi terhadap mata uang *baht* Thailand yang kemudian berdampak menjalar (*contagion effect*) ke mata uang rupiah Indonesia. Melemahnya rupiahnya telah mendorong investor luar negeri menarik dananya pada waktu bersamaan dari Indonesia yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio surat-surat berharga seperti *commercial papers promissory notes and medium term notes* maupun saham dan obligasi. Kepanikan kemudian terjadi di pasar valuta asing terutama karena perusahaan dan bank-bank didalam negeri ingin memborong devisa untuk membayar atau melindungi kewajiban luar negerinya dari resiko niali tukar. Akibatnya, nilai rupiah semakin merosot hingga pernah mencapai tingkat terendah sekitar Rp 15.000 per dolar AS pada awal tahun 1998 (Warjiyo, 2004).

Perkembangan inflasi juga tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan moneter, tetapi juga oleh kebijakan Pemerintah dibidang harga (*administired prices*), seperti perubahan harga BBM, upah minimum, tarif listrik dan telepon, serta oleh gangguan disisi produksi dan distribusi barang karena kondisi sektor rill yang belum pulih. Berikut adalah contoh karakteristik inflasi di Indonesia dalam beberapa dekade lalu :

Tabel 1. Disagregasi Inflasi Indonesia

Periode		IHK			
		Headline	Inti	Administired	Volatile Food
Pra Krisis (1990:04-1997:07	Rata-rata	8,3	8,4	8,2	8,8
	Std, Deviasi	1,9	1,9	5,5	4,0
Pasca Krisis (2000:01-2010:12)	Rata-rata	8,2	7,2	12,7	8,7
	Std, Deviasi	4,1	2,1	11,3	7,4
Pra ITF (2000:01-2005:06)	Rata-rata	7,9	7,7	15,0	4,5
	Std, Deviasi	3,7	2,1	8,6	6,7
ITF (2005:07-2010:12)	Rata-rata	8,5	6,6	10,4	13,0
	Std, Deviasi	4,4	1,9	13,1	5,3
Total (excl, Krisis Nilai Tukar)	Rata-rata	8,2	7,6	11,0	8,7
	Std, Deviasi	3,4	2,1	9,8	6,3

Sumber: Alisjahbana dkk, 2003

Tabel diatas menunjukkan bahwa perilaku inflasi Indonesia ditandai dengan karakteristik yang cukup unik, dimana inflasi masih tetap bertahan di level tinggi, paling tidak lama dua dekade terakhir. Di luar periode krisis, rata-rata inflasi masih bertengger di sekitar 8,2%, disertai dengan volatilitas (standar deviasi) yang cukup tinggi. Bahkan setelah mengeliminir pengaruh kejutan-kejutan struktural (*shocks*), keismpulan mengenai masih tingginya level inflasi Indonesia yang tidak berubah seperti tercermin dari rata-rata inflasi inti yang masih mencapai 7,6%. Meski demikian, pasca implementasi ITF inflasi inti cenderung menurun hingga secara rata-rata mencapai 6,6%. Hal ini mengandung arti bahwa jika tidak terjadi kejutan dari sisi penawaran dan dengan catatan sisi permintaan tidak mengalami perubahan yang berarti, maka inflasi cenderung akan mengarah ke level inflasi tersebut.

Dari sisi kelembagaan, penguatan Bank Indonesia sebagai bank sentral RI dibentuk dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai penganti UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam landasan hukum yang baru ini, Bank Indonesia mempunyai tujuan yang lebih fokus, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah, dalam arti terkendalinya laju inflasi dan stabilnya nilai tukar rupiah, merupakan salah satu prasyarat mendasar bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reorientasi sasaran Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia. Hal itu sekaligus meletakkan landasan yang kokoh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia di tengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif

Copyright © 2017, Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi Bisnis ISSN: 2579-8715

dan terintegrasi. Sebaliknya, kegagalan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah seperti tercermin pada kenaikan harga-harga dapat merugikan karena berakibat menurunkan pendapatan rill masyarakat dan melemahkan daya saing perekonomian nasional dalam perekonomian dunia.

METODE PENELITIAN

KAJIAN PUSTAKA

Kerangka Kebijakan Moneter

Kerangka strategis kebijakan moneter pada dasarnya terkait dengan penetapan tujuan akhir kebijakan moneter dan strategi untuk mencapainya. Dalam kaitan ini, seperti telah dijelaskan sebelumnya, tujuan akhir yang ingin dicapai oleh kebijakan moneter lebih terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Melalui pencapaian tujuan ini, kebijakan moneter dapat memberikan kontribusi optimal pada pencapaian stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan dan penciptaan kesempatan kerja. Permasalahannya adalah bahwa kedua sasaran kebijakan moneter tersebut diatas belum tentu dapat dicapai secara bersamaan karena seringkali pencapaian sasaran-sasaran akhir tersebut bersifat kontradiktif. Misalnya, upaya untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja pada umumnya dapat mendorong peningkatan harga sehingga pencapaian stabilitas ekonomi makro tidak optimal.

Menyadari kontradiksi pencapaian sasaran tersebut, bank sentral diharapkan pada dua alternatif. Pilihan pertama adalah memilih salah satu sasaran untuk dicapai secara optimal dengan mengabaikan sasaran lainnya, misalnya memilih pencapaian tingkat inflasi yang relatif rendah dengan mengabaikan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam jangka pendek. Pilihan kedua adalah semua sasaran diusahakan untuk dapat dicapai, tetapi tidak ada satupun yang dicapai secara optimal; misalnya mencapai tingkat inflasi yang relatif rendah dengan mengabaikan pertumbuhan ekonomi khsusunya dalam jangka pendek. Pilihan kedua adalah semua sasaran diusahakan untuk dapat dicapai, tetapi tdak ada satupun yang dicapai secara optimal; misalnya mencapai tingkat inflasi yang tidak terlalu rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sedikit lebih tinggi. Menyadari kelemahan tersebut, dewasa ini beberapa negara secara bertahap telah bergeser menerapkan kebijakan moneter yang lebih memfokuskan pada sasaran tunggal, yaitu stabilitas harga, sebagai sasaran jangka menengah-panjang (Miskhin, 1999).

Secara prinsip, terdapat beberapa strategi dalam mencapai tujuan kebijakan moneter. Masing-masing strategi memiliki karakteristik sesuai dengan indikator tertentu yang digunakan sebagai *nominal anchor* (jangkar nominal) atau semacam sasaran antara dalam mencapai tujuan akhir. Beberapa strategi kebijakan moneter tersebut, antara lain : *exchange rate targeting* (penargetan nilai tukar), *monetary targetting* (penargetan besaran moneter, *inflation targetting* (penargetan inflasi), *implicit but not xplicit anchor* (strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas).

Kondisi Kekinian Model *Inflation Targeting*

Pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah membawa perubahan mendasar pada`perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia. Seperti telah disinggung di muka, berdasarkan UU tersebut kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Sejalan dengan itu, sejak tahun 2000 Bank Indonesia mulai menempuh langkah-langkah untuk penerapan kerangka kerja kebijakan moneter berdasarkan suatu kerangka yang dikenal dalam literatur ekonomi dan praktek di bank-bank sentral lain dengan sebutan *Inflation Targetting Framework* (ITF). Hal ini antara lain tercermin pada penetapan dan pengumuman sasaran inflasi sebagai tujuan utama kebijakan moneter, penjelasan secara periodik kepada masyrakat mengenai pelaksanaan kebijakan moneter yang ditempuh, maupun pemberian independensi kepada Bank Indonesia dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter (Rachbini dkk, 2000).

ITF merupakan kerangka kerja merupakan kerangka kerja kebijakan moneter yang relatif baru digunakan. Kerangka kerja kebijakan moneter ini pertama kali diterapkan oleh Selandia Baru pada tahun 1990 dan semakin banyak diterapkan oleh bank sentral di negara-negara lain sebagai langkah mendasar dalam memperkuat efektivitas penerapan kebijakan moneternya. Secara umum, kerangka kerja ini diyakini dapat membantu bank sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan harga dengan menentukan sasaran kebijakan moneter secara eksplisit dengan berdasarkan pada proyeksi dan target inflasi tertentu ke depan. Bagaimana kerangka dasar *inflation targeting* tersebut umumnya diterapkan

Copyright © 2017, Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi Bisnis ISSN: 2579-8715

di bank-bank sentral lain dan bagaimana langkah-langkah yang ditenpuh Bank Indonesia dalam penerapan kerangka kerja dimaksud dijelaskan pada bagian bawah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Flexible* ITF (*Inflation Targeting Framework*): Sinergitas Kebijakan Moneter dengan Sasaran Kestabilan Harga

Inflation Targeting Framework (ITF) merupakan suatu kerangka kebijakan moneter yang mempunyai ciri-ciri utama, yaitu adanya pernyataan resmi dari bank sentral dan dikuatkan dengan undang-undang bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah, serta pengumuman target inflasi kepada publik. Pengumuman tersebut mengundang arti bahwa bank sentral memberikan komitmen dan jaminan kepada publik bahwa setiap kebijakan moneternya selalu mengacu pada pencapaian target tersebut dan bank sentral mempertanggungjawabkan kebijakannya apabila target tersebut tidak tercapai.

Secara lebih rinci, karakteristik *Inflation Targeting* sebagaimana dikemukakan oleh Bernake *et al* (1999) dan Svensson (2000) ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 2. Karakteristik *Inflation Targeting*

No.	Kriteria	Bernake et al.	Svensson
1.	Kestabilan harga sebagai tujuan utama kebijakan moneter	Ya	Ya
2.	Pengumuman target inflasi	Ya	Ya
3.	Target Inflasi Jangka Menengah	Tidak Jelas	Ya
4.	Komunikasi intensif dengan publik	Ya	Ya
5.	Penggunaan *monetary policy rule* secara spesifik	Tidak Jelas	Penargetan Prakiraan Inflasi
6.	Publikasi prakiraan inflasi dan *output*	Tidak Perlu	Ya
7.	Target ditetapkan oleh Pemerintah (*goal dependence*)	Ya	Tidak Perlu
8.	Penggunaan instrumen secara independen (*instrumen independence*)	Ya	Ya, Tetapi Tidak Disebutkan Secara Tegas

Sumber: Bofinger, Peter, Monetary Policy: Goals, Institutions, Strategies and *Instruments, Oxford University Press, 2001 : 259.*

Prinsip dasar yang melandasi kerangka kerja *Inflation Targetting* tersebut adalah bahwa sasaran akhir dari kebijakan moneter diutamakan untuk mencapai dan memelihara laju inflasi yang rendah dan stabil. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangkan pokok. *Pertama*, laju inflasi yang tinggi menimbulkan biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat karena menurunnya daya beli atas pendapatan yang diperolehnya maupun meningkatnya ketidakpastian yang dapat mempersulit perencanaan usaha dan memperburuk kegiatan perekonomian. *Kedua*, perkembangan teori ekonomi dalam literatur dan temuan empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan moneter dalam jangka menengah-panjang hanya berpengaruh pada inflasi dan bukan pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Berdasarkan dua pertimbangkan diatas, maka kontribusi optimal yang dapat disumbangkan oleh kebijakan moneter dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat adalah dengan pencapaian dan pemeliharaan lju inflasi yang rendah dan stabil. Dalam kaitan ini, pengendalian inflasi ini melalui kebijakan moneter tersebut adalah dalam rangka stabilitas dan penurunan laju inflasi dalam jangka menengah-panjang dan bukan dalam jangka pendek.

Bagaimana konsep dasar kebijakan moneter dengan kerangka *Inflation Targeting* tersebut diterapkan di berbagai bank sentral, dapat dijelaskan dengan pokok-pokok kerangka kerja yakni : (1) Sasaran Inflasi, (2) Kebijakan Moneter mengarah ke depan, (3) Transparasi, serta (4) Akuntabilitas dan Kredibilitas.

Selain konsep dasar tersebut, keberhasilan penerapan kerangka kerja *Inflation Targeting* mensyaratkan beberapa hal yaitu :

- *Pertama, Inflation Targeting sebagai strategi dasar kebijakan moneter,*

Copyright © 2017, Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi Bisnis ISSN: 2579-8715

Substansi utama dari hal ini adalah bahwa pengendalian inflasi sesuai target sebagai *overriding objective* kebijakan moneter. *Trade-off* pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar dan stabilitas sistem keuangan dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan moneter. Namun, apabila terjadi konflik, maka pencapaian target inflasi yang diutamakan.

- *Kedua, Integrasi kebijakan moneter dan makropudensial dalam mencapai kestabilan makroekonomi secara keseluruhan,*

  Respon kebijakan suku bunga sebagai *stance* kebijakan utama perlu didukung oleh kebijakan nilai tukar dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan aliran modal asing dan likuiditas domestik.
- *Ketiga, Peran kebijakan nilai tukar dan kebijakan arus modal dalam kerangka kebijakan moneter untuk mencapai kestabilan harga.*

  Penguatan kebijakan nilai tukar dilakukan konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas makro ekonomi. Solusi '*possible trinity*' yang optimal dicari dengan melihat keterkaitan kebijakan stabilitas nilai tukar dengan pengelolaan *capital flows* dan implikasinya terhadap kecukupan cadangan devisa.
- *Keempat, Penguatan kerangka koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah untuk mengendalikan harga serta menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.*

  Penguatan kerangka koordinasi menjadi sangat penting mengingat selain dari sisi permintaan, sumber tekanan inflasi juga berasal dari sisi penwaran dan komoditi strategis. Selain itu, semakin terbatasanya kapasitas ekonomi dan kendala implementasi program infrastruktur masyarakat penerapan strategi kebijakan yang terintegratif diantara otoritas kebijakan.
- *Kelima, Penguatan komunikasi kebijakan moneter dan makroprudensial sebagai bagian dari instrumen kebijakan.*

  Komunikasi kebijakan moneter bukan lagi ditujukan hanya untuk mencapai transparasi dan akuntabilitas, namun lebih sebagai sebuah instrumen kebijakan moneter yang sangat berperan. Dalam komunikasi kebijakan didesain untuk menggerakkan ekspektasi publik dan pelaku pasar, mengurangi ketidakpastian, meredam '*noise*' dan meningkatkan kepastian arah kedepan (*predictability*) sehingga dapat mengurangi volatilitas pasar keuangan dan memberikan pemahaman kepada publik (*public education*).

Sehubungan dengan pemikiran diatas, maka format kerangka kerja *Flexible Inflation Targeting Framework* (ITF) dapat diletakkan dalam dimensi makroekonomi dengan lima elemen dasar yang secara umum dicerminkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Elemen Dasar *Flexible* ITF
Sumber: Raharjo, 1955

Dengan merujuk pada lima elemen tersebut, dalam pencapaian *overriding objectives* ITF dan *Flexible* ITF secara subtantif adalah sama, yaitu pengendalian inflasi. Perbedaan yang penting adalah terkait dengan pemaknaan substansi "fleksibilitas", yaitu fleksibel dalam menempatkan ketangka stabilitas sistem keuangan dengan penerapan bauran instrumen kebijakan moneter-makroprudensial; fleksibel dalam menempatkan peran kerangka strategis pengelolaan nilai tukar, serta penguatan

Copyright © 2017, Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi Bisnis ISSN: 2579-8715

kelembagaan untuk mengoptimalkan peran koordinasi dan komunikasi kebijakan. Perbedaan tersebut disampaikan pada Gambar 2.

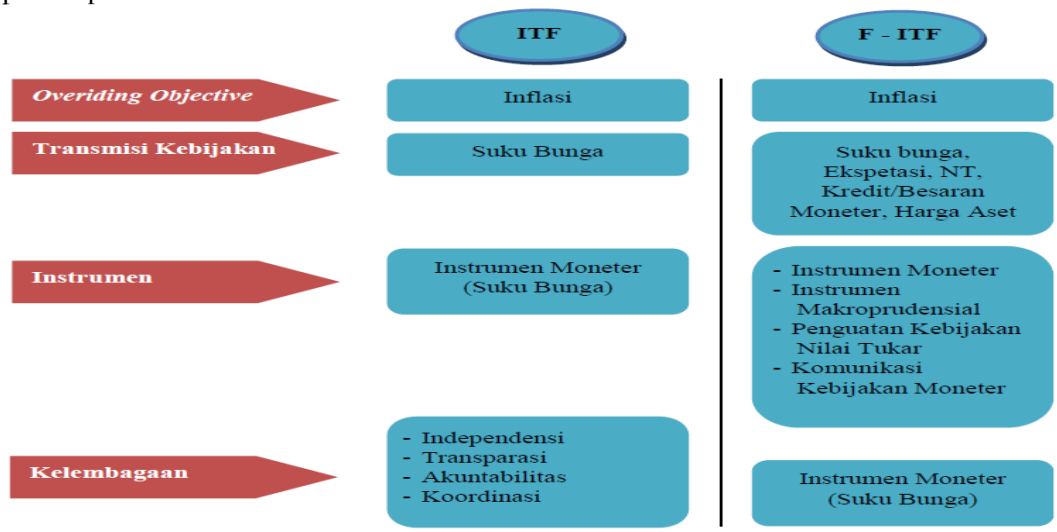

Gambar 2. Perbedaan ITF dan *Flexible* ITF
Sumber: www.bi.go.id, 2017

Terkait dengan perbedaan diatas, suatu substansi yang paling mendasar yang perlu mendapat perhatian yaitu bahwa dalam merumuskan strategi kebijakan moneter pasca krisis, Bank Indonesia dituntut untuk semakin memperkuat stabilitas sistem keuangan untuk memastikan perekonomian dan sistem keuangan berada dalam kondisi yang stabil baik dari sisi makroekonomi maupun sektor keuangan. Pergeseran atau penekanan mandat bank sentral untuk menjaga stabilitas sistem keuangan memiliki konsekuensi pada komplikasi tata kelola kebijakan. Untuk itu, format mandat Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan secara bersamaan perlu dirumuskan dengan tepat, khususnya terkait dengan upaya untuk menrumuskan intergrasi atau bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang optimal. Dalam kaitan ini, merujuk pada beberapa pemikiran dan pengamatan empiris, format integrasi kebijakan yang optimal perlu tetap mengacu pada pertimbangan utama bahwa kebijakan yang diterapkan nantinya tidak kontradiktif terhadap pencapaian sasaran inflasi dalam jangka menengah dan panjang.

Keterlibatan Berbagai Pihak pada Program *Flexible* ITF

Seperti telah dikemukakan diatas, UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah memberikan landasan hukum yang jelas menyangkut kewenangan dan independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang moneter, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Undang-undang tersebut juga secara implisit mengamanatkan kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia berdasarkan pada kerangka kerja yang dikenal dengan sebutan *Inflation Targeting Framework* (ITF) seperti yang diuraikan diatas. *Pertama*, adanya pengaturan dan pemahaman bahwa tujuan utama kebijakan moneter adalah kestabilan harga. *Kedua*, adanya penetapan dan pengumuman sasaran inflasi kepada masyarakat. *Ketiga*, adanya pengaturan bahwa sasaran inflasi merupakan sasaran akhir dan sebagai dasar perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter. *Keempat*, adanya pemberian independensi kepada Bank Indonesia dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneternya. *Kelima*, adanya kewajiban bagi Bank Indonesia untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan moneternya kepada masyarakat sebagai perwujudan azas transparasi. *Keenam*, adanya mekanisme akuntabilitas bagi bank sentral untuk mempertanggung jawabkan dan dinilai kinerjanya dalam pelaksanaan kebijakan moneter oleh DPR.

Berbagai persyaratan untuk mendukung keberhasilan penerapan kerangka *inflation targeting* juga telah diatur dalam undang-undang dan atau telah dikembangkan oleh Bank Indonesia. Mengenai independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter (*instrument independent*) dan pembatasan terhadap Bank Indonesia dalam pembiayaan pengeluaran fiskal Pemerintah (*no fiscal diminance*) telah diatur dalam UU No.3 Tahun 2004. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia diberikan

Copyright © 2017, Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi Bisnis ISSN: 2579-8715

kewenangan penuh dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneternya, Pemerintah dan pihak-pihak lain dilarang untuk campar tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia juga dilarang untuk memberikan pinjaman kepada Pemerintah untuk membiayai pengeluaran fiskal, kecuali dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat atas beban APBN dalam rangka mengatasi krisis perbankan yang bersifat sistematik dan mengancam perekonomian nasional. Demikian pula, mengenai sistem nilai tukar juga dianut sistem nilai tukar mengambang sebagaimana dipersyaratkan dalam penerapan kerangka *inflation targeting*.

Langkah Strategis : Telaah *Opportunity*

Mengenai indikator harga yang relevan dengan kebijakan moneter, Bank Indonsia juga telah mengembangkan pengukuran inflasi inti dan model penetapan sasaran inflasi berdasar pada inflasi IHK dengan memperhitungkan perkembangan ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia juga telah dan terus memperkuat pengembagan model-model proyeksi ekonomi dan inflasi serta berbagai penelitian lain yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan adanya model proyeksi inflasi yang baik dalam penerapan kerangka *inflation targeting*. Dalam kaitan ini, untuk mendukung kualitas evaluasi dan proyeksi ekonomi serta arah kebijakan moneter tersebut, juga ditempuh langkah-langkah persiapan operasional, seperti pengembangan model-model ekonomi untuk proyeksi inflasi, nilai tukar rupiah, ekonomi makro, hingga pengkajian transmisi dan pengembangan instrumen moneter. Termasuk di dalamnya adalah perubahan mekanisme operasi pengendalian moneter dari semula berdasar uang primer menjadi suku bunga sebagai sasaran operasional yang mulai diterapkan secara bertahap tahun 2004.

Meskipun berbagai langkah-langkah persiapan dan penguatan kebijakan moneter telah dan terus dilakukan oleh Bank Indonesia, penerapan kerangka *inflation targeting* di Indonesia tidaklah mudah. Hal ini terutama terkait dengan kondisi perekonomian dan sistem perbankan yang sedang mengalami perubahan struktural. Meskipun kredit perbankan telah mengalami peningkatan, tingkat pertumbuhannya belum optimal dan pemanfaatannya oleh sektor rill relatif rendah karena banyak dunia usaha yang masih menghadapi restrukturisasi usaha dan kewajibannya baik terhadap pihak luar negeri maupun perbankan dalam negeri. Permasalahan fungsi intermediasi perbankan yang belum berjalan normal pada akhirnya telah mempengaruhi efektivitas mekanisme transmisi dan kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Dengan kondisi demikian, langkah-langkah kebijakan moneter Bank Indonesia, misalnya dengan perubahan suku bunga SBI tidak selalu dapat secara efektif mempengarui perkembangan suku bunga perbankan maupun berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan secara keseluruhan yang diperlukan mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Gagasan yang Diajukan

Melalui amandemen UU Nomor 23 Tahun 1999 dalam UU Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia diberikan kewenangan penuh dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneternya. Berdasarkan pada kerangka kerja yang dikenal dengan sebutan *Flexible Inflation Targeting Framework* (ITF) yang pertama kali diterapkan oleh Selandia Baru pada tahun 1990, lebih diarahkan kepada upaya menciptakan dan menjaga stabilitas moneter. Secara ringkas, pokok-pokok konsep dasar penerapan ITF dimaksud dapat disarikan sebagai berikut : (1) Sasaran Inflasi, (2) Kebijakan Moneter mengarah kedepan, (3) Transparasi dan (4) Akuntabilitas. Dengan penerapan kerangka kebijakan moneter berdasar ITF secara penuh dengan suku bunga sebagai sasaran-operasional yang telah dicanangkan Bank Indonesia mulai tahun 2004 diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Teknik Implementasi

Diperlukan langkah strategis dan inovatif yang dapat meningkatkan kinerjanya sebagai otoritas moneter dengan *Flexible Inflation Targeting Framework* (ITF*)* yang berkontribusi besar terhadap stabilitas moneter Indonesia sejak penerapannya pada tahun 2004. Optimalisasi pengawasan uang beredar yang berasal dari aliran dana luar negeri tersebut terhadap peningkatan inflasi dan kestabilan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia harus melakukan penyerapan kelebihan likuiditas dalam perekonomian, sehingga mendorong kenaikan suku bunga dalam negeri.

Copyright © 2017, Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi Bisnis ISSN: 2579-8715

Disamping itu, Pemerintah harus lebih proaktif sebagai regulator kebijakan dengan pengawasan dan koordinasi terhadap kinerja Bank Indonesia, khususnya dalam hal pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Prediksi Hasil Model

Perbaikan kondisi perekonomian dan perbankan diharapkan akan terus berlangsung kedepan dengan didukung oleh perbaikan kondisi sosial politik nasional, khususnya dengan peralihan Pemerintahan hasil Pemilu tahun 2004. Apabila perbaikan seperti ini dapat diwujudkan, penerapan kerangka kebijakan moneter berdasar *Flexible Inflation Targeting Framework* (ITF) secara penuh dengan suku bunga sebagai sasaran-operasional yang telah dicanangkan Bank Indonesia mulai tahun 2004 ini diharapkan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Alisjahbana, A., Yusuf, A., Chotib, Yasin, M., & Soeprobo, T. (2003). Understanding the Determinants and Consequences of Income Inequality in Indonesia. East Asian Development Network (EADN). Bangkok.

Anonim. UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Jakarta.

_____. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Jakarta.

_____. UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Tugas dan Wewenang Bank Indonesia. Jakarta.

Bernanke, B,S. and M. Gertler. (1999). Should Central Bank Respond to Movements in Asset Prices ?. American Economic Review, 84 (4), hlm: 17-52.

Bofinger, Peter. (2001). Monetary Policy: Goals, Institutions, Strategies and Instruments. Oxford University Press. New York.

Miskhin, F.S. (1999). International Experiences with Different Monetary Policy Regimes. Journal of Monetary Economics, Hal: 43.

Rachbini, Didik J. dkk. (2000). Bank Indonesia: Menuju Independensi Bank Sentral. PT Mardi Mulyo. Jakarta.

Raharjo, Dawam. (1955). Sejarah Bank Indonesia. LP3ES. Jakarta.

Svensson. (2000). Inflation Targetings as a Monetary Policy Rule. Journal of Monetary Economics.

Warjiyo, Perry. (2004). Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia. Buku Seri Kebanksentralan Nomor 11. PPSK. Bank Indonesia.

http://www.bi.go.id. Diunduh Pukul 22.10 WITA (28 Maret 2017). Samarinda.

Copyright © 2017, Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi Bisnis ISSN: 2579-8715